

## **Analisis Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong**

**Yurika\*, Muhammad Saleh**

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

\*[Ervinayurika@gmail.com](mailto:Ervinayurika@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to examine and analyze the regional financial performance of the Tabalong District government based on regional financial analysis for the period of 2010 to 2017 the analysis techniques used include the Regional Financial Independence Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, PAD Effectiveness Ratio, PAD Growth Ratio, and Activity Ratio. The data used are secondary data obtained from the Regional Finance Agency Of South Kalimantan Province and the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of finance.*

*The results of the analysis obtained in this study are : 1) Regional independence ratio in general from 2010 to 2017 falls into the very low category. 2) The Fiscal Decentralization Ratio in general from 2010 to 2017 falls into the very poor category 3) The PAD Effectiveness Ratio in general from 2010 to 2017 falls into the effective category 4) PAD Growth Ratio in general from 2010 to 2017 show that direct expenditure is greater than indirect expenditure in each of the fiscal years.*

**Keywords:** *Regional Finance, regional autonomy*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan analisis keuangan daerah periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 teknik analisis yang digunakan diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD, dan Rasio Aktivitas. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 1) Rasio Kemandirian daerah secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori rendah sekali. 2) Rasio Desentralisasi Fiskal secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori sangat kurang. 3) Rasio Efektivitas PAD secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori efektif 4) Rasio Pertumbuhan PAD secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 secara umum masuk dalam kategori cukup 5) Rasio Aktivitas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung pada setiap tahun anggarannya.

**Kata Kunci:** Keuangan daerah, Otonomi daerah

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah salah satu daerah yang memiliki sumber pendapatan daerah dari berbagai macam sektor dan memiliki kompetensi untuk diteliti sebagai bahan kajian dalam mempelajari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun daerah dan menuju tingkat kemandirian daerah sebagai langkah menuju keberhasilan melaksanakan otonomi daerah.

Delapan tahun terakhir pemerintah Kabupaten Tabalong telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 691.341.860,00 meningkat sebesar Rp. 1.331.426.000,000 pada tahun 2017, pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010 sebesar Rp. 31.131.900,00 sampai tahun 2017 sebesar Rp. 137.297.000,00 dana perimbangan dari tahun 2010 sebesar Rp. 581.36.240,00 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.010.438.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2010 sebesar Rp. 78.873.660,000 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 183.727.000,000.

Peningkatan pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terjadi kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan turun ditahun 2017,serta pendapatan asli daerah meningkat signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2017.

### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?
2. Bagaimana Rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?
3. Bagaimana Rasio Efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?

4. Bagaimana Rasio Perumbuhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?
5. Bagaimana Rasio Aktivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?

#### **Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui Rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong
3. Untuk mengetahui Rasio Efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong
4. Untuk mengetahui Rasio Pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong
5. Untuk mengetahui Rasio Aktivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

##### **Otonomi Daerah**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (Mahbur,2016) Pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

##### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah (Halim,19) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan Undang-undang yang berlaku.

##### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (Halim,2007) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah 1.Masyarakat 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksaan 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman 4. Pemerintah.

### **Analisis Rasio Keuangan Daerah**

analisis laporan keuangan (Halim,231) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah (Halim,2002:126) adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

### **Penelitian Terdahulu**

1. (Hariati Eka Putri,2017) pada hasil penelitiannya yaitu 1. Tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru masih bergantung terhadap pemerintah pusat, karena pendapatan

daerah dari segi PAD masih sangat kecil 2. Kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru menghasilkan pola hubungan instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan atau dengan kata lain belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. 3. Pertumbuhan keuangan Kota Pekanbaru adalah negative karena pendapatan pemerintah masih banyak dihabiskan untuk membiayai belanja operasional daerah dibandingkan untuk belanja pembangunan.

2. (Evipani Rima De Villanova,2015) pada hasil penelitiannya yaitu 1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2009-2012 masih sangat kurang 2. Kinerja pemerintah didalam memungut PAD (pajak daerah) sudah efisien 3. Secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil.
3. (Masita Machmud,George Kawung dan Wensy Rompas,2014) pada hasil penelitiannya yaitu 1. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan rata-rata dalam kinerja keuangan daerah yang masih belum begitu baik atau belum stabil 2. Perhitungan setiap tahun masih mengalami fluktuasi sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan trend positif dan trend negative,terjadi karena pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum matang dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran suatu keadaan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis suatu penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan cara mengumpulkan, mencatat, mempelajari data-data yang ada di dinas/instansi yang diperlukan dan studi pustaka dari buku-buku, jurnal ilmiah.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan cara menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis suatu penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa variabel-variabel kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah (Halim,2007)

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

2. Desentralisasi Fiskal,(Mahmudi,2011)

$$\textbf{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total penerimaan daerah}} \times 100\%$$

3. Efektivitas,(Halim,2007)

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

4. Pertumbuhan,(Halim,2002)

$$\textbf{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun amatan} - \text{PAD periode sebelumnya}}{\text{PAD periode selanjutnya}} \times 100\%$$

5. Aktivitas,(Halim,2002)

$$\textbf{Rasio Aktivitas 1} = \frac{\text{total belanja tidak langsung}}{\text{total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas 2} = \frac{\text{total belanja langsung}}{\text{total APBD}} \times 100\%$$

## HASIL DAN ANALISIS

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel.5.4  
 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PAD(Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Pola Hubungan	Keterangan
2010	31.131.903.43	650.118.163.51	4,79	rendah	instruktif
2011	6,67	4,00	4,55	sekali	instruktif
2012	35.194.608.08	773.982.487.39	4,89	rendah	instruktif
2013	4,39	4,00	7,62	sekali	instruktif
2014	46.232.992.58	945.789.163.83	9,10	rendah	instruktif
2015	6,30	6,00	11,03	sekali	instruktif
2016	71.095.755.68	933.540.215.57	9,88	rendah	instruktif
2017	0,00	5,00	13,58	sekali	instruktif
	70.447.086.38	773.982.487.39		rendah	
	8,78	4,00		sekali	
	123.177.869.3	1.116.819.735.7		rendah	
	24,50	68,00		sekali	
	144.964.679.7	1.467.829.125.7		rendah	
	95,20	63,00		sekali	
	151.740.620.7	1.117.699.183.5		rendah	
	54,58	15,00		sekali	
Rata-rata			8,18	rendah sekali	instruktif

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010-2017 masih relatif rendah sekali ( nilai rasio kemandiriannya berada antara kisaran 0%-25%) . rendahnya kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Tabalong menggambarkan bahwa pola hubungan adalah instruktif yang artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat

tinggi. Pemerintah daerah belum dapat menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan utama.

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 5.5  
 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan keuangan
2010	31.131.903.436,67	691.341.805.050,67	4,50	sangat kurang
2011	35.194.608.084,39	811.097.409.198,39	4,34	sangat kurang
2012	46.232.992.586,30	999.863.419.294,30	4,62	sangat kurang
2013	71.095.755.680,00	1.011.979.247.226,00	7,03	sangat kurang
2014	70.447.086.388,78	846.350.887.502,78	8,32	sangat kurang
2015	123.177.869.324,50	1.229.732.022.600,00	10,02	sangat kurang
2016	144.946.679.795,00	1.307.224.926.758,00	11,09	sangat kurang
2017	151.740.620.754,58	1.240.445.578.583,00	12,23	sangat kurang
Rata-rata			7,77	sangat kurang

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Tabalong tahun 2010-2014 masih sangat kurang selanjutnya dari tahun 2015-2017 menunjukkan hasil dengan capaian kurang .nilai rasio desentralisasi fiskal berada antara kisaran 0,00%-10,00% yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang kontribusinya sangat kurang menyumbang dari total penerimaan daerah yang berarti bahwa PAD sangat kurang dalam membantu pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan desentralisasi fiskal.



### 3. Rasio Efektivitas

Tabel 5.6  
Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan keuangan
2010	31.131.903.436,67	36.974.225.065,00	84,20	cukup efektif
2011	35.194.608.084,39	49.185.649.000,00	71,55	kurang efektif
2012	46.232.992.586,30	52.912.470.860,00	87,38	cukup efektif
2013	71.095.755.680,00	69.674.967.080,00	102,04	sangat efektif
2014	70.447.086.388,78	95.578.314.000,00	73,71	kurang efektif
2015	123.177.869.324,50	113.261.638.000,00	108,76	cukup efektif
2016	144.964.679.795,00	121.933.061.000,00	118,89	sangat efektif
2017	151.740.620.754,58	169.961.799.000,00	89,28	cukup efektif
Rata-rata			91,97	Efektif

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio efektivitas Kabupaten Tabalong dari tahun 2010-2017. Pada tahun 2010,2012,2017 tingkat efektivitas berada diatas 80% yang artinya masuk dalam kategori cukup efektif sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitas berada dibawah 100% yang artinya masuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2013-2016 tingkat efektivitas berada diatas 100% yang artinya masuk dalam kategori sangat efektif.

4. Rasio Pertumbuhan

Tabel 5.7  
 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan(%)	Kemampuan Keuangan
2009	24.879.970.534,06	-	-
2010	31.131.903.436,67	25,13	cukup
2011	35.194.608.084,39	13,05	kurang
2012	46.232.992.586,30	31,36	cukup
2013	71.095.755.680,00	53,78	sedang
2014	70.447.086.388,78	0,91	sangat kurang
2015	123.177.869.324,50	74,85	baik
2016	144.964.679.795,00	17,67	sangat kurang
2017	151.740.620.754,58	4,67	kurang
Rata-rata		27,45	cukup

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan Kabupaten Tabalong dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi dari setiap masing-masing tahun. Hasil dari persentase secara umum diperoleh rata-rata sebesar 27,45%. Dari hasil perkembangan dapat dilihat dari tahun ketahun rasio mengalami peningkatan maka dapat dikatakan rasio pertumbuhan secara positif.

5. Rasio Aktivitas

Tabel 5.8  
 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017  
 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)	Rasio Aktivitas (%)
2010	209.318.084.805,00	721.220.359.691,00	29,02
2011	385.047.547.128,00	815.831.328.341,00	47,20
2012	429.322.482.520,00	901.113.149.441,00	47,64
2013	452.863.521.423,00	809.762.231.830,00	55,93
2014	385.047.547.128,00	815.831.328.341,00	47,20
2015	612.748.866.149,00	1.238.160.101.966,00	49,49
2016	713.142.662.714,00	1.499.005.805.906,00	47,57
2017	826.053.151.399,00	1.421.099.847.000,00	58,13
Rata-rata			47,77

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio aktivitas untuk belanja tidak langsung Kabupaten Tabalong dari tahun 2010-2017. Pada tahun 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 belanja tidak langsung terjadi kenaikan dari tahun ketahun.Hasil persentase rasio aktivitas pada setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi.

Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)	Rasio Aktivitas (%)
2010	511.902.274.886,00	721.220.359.691,00	70,98
2011	430.783.781.213,00	815.831.328.341,00	52,80
2012	471.790.666.921,00	901.113.149.441,00	52,36
2013	356.898.710.407,00	809.762.231.830,00	44,07
2014	430.783.781.213,00	815.831.328.341,00	52,80
2015	625.411.235.817,00	1.238.160.101.966,00	50,51
2016	785.863.113.192,00	1.499.005.805.906,00	52,43
2017	595.046.695.601,00	1.421.099.847.000,00	41,87
Rata-rata			52,23

Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio aktivitas untuk belanja langsung Kabupaten Tabalong dari tahun 2010-2017 mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja tidak langsung sebesar 52,23% sedangkan untuk belanja langsung sebesar 47,77% dari hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung untuk tiap tahun anggarannya. Pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

## **PENUTUP**

### **Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup hanya meneliti daerah Kabupaten Tabalong sehingga belum dapat melihat secara menyeluruh kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah secara lebih luas.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010-2017 keuangan daerah di Kabupaten Tabalong yang berada dalam skala interval dari 0%-25% yaitu menunjukkan masih rendah, rasio desentralisasi fiskal dalam kurun waktu selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010-2017 keuangan daerah di Kabupaten Tabalong berada dalam skala interval dari 0,00%-10,00% yang artinya berada dalam kriteria sangat kurang, rasio efektivitas pendapatan Asli Daerah selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010-2017 keuangan daerah berada dalam kriteria rata-rata melebihi  $< 100\%$  maka dapat dikatakan efektif, rasio pertumbuhan selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010-2017 pendapatannya tumbuh positif yang artinya berada dalam skala interval 20,01%-40,00% masuk dalam kriteria cukup, rasio aktivitas (belanja langsung dan belanja tidak langsung) selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010-2017 keuangan daerah di Kabupaten Tabalong bahwa belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung pada setiap tahun anggaran.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Tabalong harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan serta menggali sumber-sumber potensial yang baru serta

mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada seperti pajak dan retribusi, mengembangkan potensi sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya serta memperluas lapangan pekerjaan, harus mampu mempertahankan hasil yang sudah dicapai, mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah yang mandiri dan berkesinambungan.

### **Daftar Referensi**

2006, P. M. (n.d.). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

2010, P. P. (n.d.). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

2010-2017, B. K. (n.d.).

Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Indonesia, D. J. (n.d.). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

Mahbur. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makasar.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Masita Machmud, G. K. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Volume 12.

Putri, H. E. (2017). *Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Tabalong, B. P. (n.d.).

Villanova, E. R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012*.